

ANALISIS PENGARUH PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PANGKALPINANG

LESTISIA MEGA APRILIA BESA

Pan Budi Marwoto

Gayatria Oktalina

Accounting Progam

STIE-IBEK Bangka Belitung

Pangkalpinang, Indonesia

e-jurnal@stie-ibek.ac.id

This study uses Location Quotient Analysis (LQ) and multiple linear regression is also carried out hypothesis testing which will be proven by the t test and f test with a probability level of 5% of the research also presents R² and multicollinearity tests. The results of LQ analysis are Advertisement Taxes, Road Lighting Taxes and Parking Taxes have comparative advantages compared to other taxes. Advertisement Tax has a LQ value of 1.01, Street Lighting Tax has a LQ value of 0.89 and Parking Tax has a LQ value of 1.08 which has a comparative advantage if the value of LQ = 1 And the value of LQ > 1, Advertising Tax, Tax on Street Lighting and Parking tax is chosen to be analyzed for its effect on local revenue because these taxes provide receipts every month and have a comparative advantage.

Keywords: *Street Lighting Tax, Advertisement Tax, Parking Tax, and PAD*

I. PENDAHULUAN

. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 BAB VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 Ayat 1 (satu) dan 2 (dua), menyatakan bahwa Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan dan rumah tangga pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2000, juga diberikan kewenangan dalam mengelola daerah yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pembangunan disetiap daerah tentu saja membutuhkan dana atau modal yang tidak sedikit, termasuk pembangunan di Kota Pangkalpinang. Modal pembangunan bagi pemerintah yaitu APBD yang terdiri dari Pendapatan, belanja dan devisa. Pembangunan sendiri adalah anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Karena tidak mungkin pemerintah dapat melakukan pembangunan jika tidak ada dana atau modal. Dana untuk belanja sendiri adalah pendapatan negara atau pendapatan daerah.

Sumber pendapatan yang utama adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD juga memiliki banyak komponen juga implikasi yang banyak. Komponen PAD yang memberikan kontribusi paling besar adalah pajak daerah yang didapat langsung dari masyarakat dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan dan suatu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pajak daerah Kota Pangkalpinang yang diduga memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah adalah Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir. Jumlah penduduk yang semakin tahun semakin bertambah menunjukkan pertumbuhan yang tinggi terhadap penggunaan Reklame, Penerangan Jalan dan otomatis keuntungan dalam pengambilan pajak parkir juga bertambah. Oleh karena itu, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir berpotensi memiliki keunggulan komparatif.

Pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif inilah yang sangat diharapkan untuk meningkatkan PAD, karena PAD sendiri memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensi daerah agar pendanaan dapat terpenuhi. Sehingga perhatian dan fokus pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif harus terus dikembangkan dan ditingkatkan, serta kebijakan untuk meningkatkan pajak daerah tersebut juga harus terus progresif tapi tanpa merugikan masyarakat.

Persoalannya kemudian, belum ada yang bisa menghasilkan kebijakan perpajakan berdasarkan pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat

memberikan saran kebijakan perpajakan yang tepat sasaran sehingga kesalahan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan yang salah sasaran tidak terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame, PPJ dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

II. LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Dalam bukunya yang berjudul *De Overheidsmiddelen Van Indonesia*, Leiden, 1949, Mr. Dr. N.J Fiedmann memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual; maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Fungsi Pajak

The Four R adalah istilah populer yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara, yaitu:

1. Revenue (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal dengan istilah Fungsi *Budgetair* (Anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, dewasa ini pajak menyumbang hampir lebih dari 70% total pendapatan negara kita. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya. Secara nyata fungsi penerimaan ini terlihat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Redistribution (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan

negara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia. Isu gerakan separatisme di beberapa daerah yang meneriakkan ketidakadilan pembangunan membuktikan hal tersebut. Apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan kemakmuran yang didamba akan dapat tercapai.

3. Repricing (Pengaturan Harga)

Fungsi ini sama pengertiannya dengan Fungsi *Regulerent* (Mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

4. Representation (Legalitas Pemerintahan)

Pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen)

Definisi Pajak daerah

Menurut Mardiasmo (Samudra, 1995) "Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan publik".

Menurut Rochmat Seoemirto (Halim, 2001) "Pajak daerah merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan negara dari sektor partikelir kepada sektor pemerintah) dengan tidak mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

Jenis Pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Tanah Air
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pengertian Pajak Reklame

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak reklame. Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempermosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan.

Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2010, tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan Jalan (PPJ) di pungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik, penyewa dan penghuni rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dan PLN maupun bukan PLN.

Pengertian Pajak Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berakaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Penelitian Terdahulu

1. Putri (2015) yang berjudul “Analisis Kontribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang” yang mempunyai hasil sebagai berikut
 - a. Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan kabupaten sumber sendiri Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh pembaharuan peraturannya tentang pengumuman resmi kebijakan biaya parkir.
 - b. Pertumbuhan retribusi parkir mengalami fluktuasi. Hal ini sesuai dengan realisasi retribusi parkir yang difokuskan hanya pada pencapaian target tanpa mempertimbangkan pertumbuhan sejarah di tahun-tahun sebelumnya.
 - c. Tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap pendapatan kabupaten sumber sendiri kabupaten Malang tergolong efektif.
 - d. Realisasi tren peramalan biaya parkir Kabupaten Malang di 2015-2019 terus meningkat.
2. Indrakusuma (2011) Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. Variabel independen: Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kota Semarang. Variabel dependen: Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. Penelitian ini menghasilkan temuan jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang dan secara keseluruhan variabel bebasnya mampu menjelaskan penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang. Variabel independen serta Alat analisis
3. Rahayuningsih (2009) dengan penelitian tentang Analisis Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Banyuwangi. Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menyatakan efektifitas penerimaan pajak reklame belum efektif karena dalam perhitungan pengukuran potensi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib pajak baru dan objek pajak dihitung berdasarkan asumsi terendah atau terkecil dari dasar perhitungan objek pajak.

Kerangka Pikir

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir sebagai pajak daerah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung yang diduga memberikan kontribusi besar terhadap PAD di Kota Pangkalpinang. PAD merupakan sumber keuangan dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir diduga memberikan pengaruh terhadap PAD.

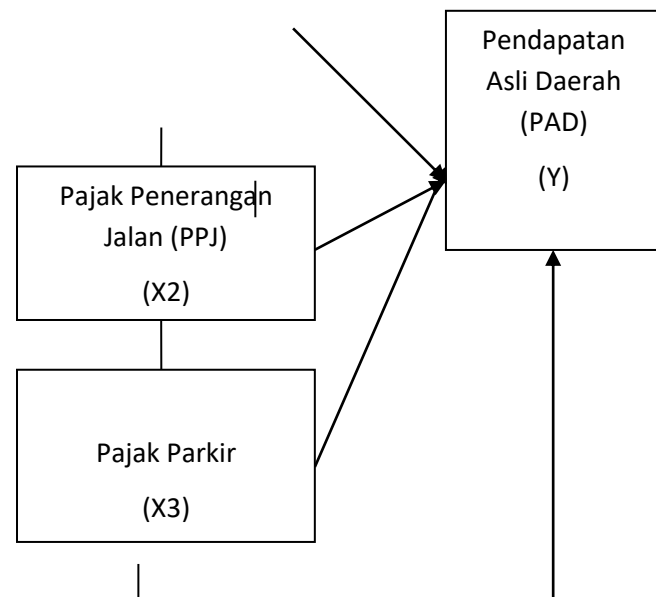
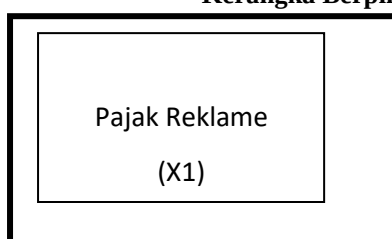
Pajak daerah merupakan komponen PAD yang memberikan penerimaan yang besar. Dan Pajak Reklame, PPJ dan Pajak Parkir diduga memiliki keunggulan komparatif tentu memberikan penerimaan yang besar untuk pajak daerah itu sendiri. Jika penerimaan pajak daerah meningkat yang mana Pajak Reklame, PPJ dan Pajak Parkir menjadi penyumbang terbesar tentu PAD juga akan meningkat. Sehingga Pajak Reklame, PPJ dan Pajak Parkir diduga memberikan pengaruh terhadap PAD Kota Pangkalpinang.

Pajak Reklame diduga memberikan pengaruh yang positif terhadap PAD. Peningkatan penerimaan Pajak Reklame karena meningkatnya jumlah reklame di Kota Pangkalpinang. Peningkatan jumlah penggunaan reklame yang meningkat tentu akan sangat berpengaruh pada peningkatan Pajak Reklame itu sendiri. Dengan meningkatnya Pajak Reklame sekaligus meningkatkan PAD Kota Pangkalpinang. Selaras dengan penelitian Riskhi (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten di Jawa Tengah dengan subjek penelitian di Dinas Pelayanan Pajak Jawa Tengah.

Pajak Penerangan Jalan diduga memberikan pengaruh yang positif terhadap PAD. Peningkatan penggunaan lampu jalan yang semakin meningkat karena adanya pembuatan jalan yang baru, perumahan dls yang semakin meningkat, tentu saja berpengaruh juga terhadap PPJ. Oleh karena itu jika dilihat dari alasan tersebut penerimaan PPJ akan sekaligus meningkatkan PAD di Kota Pangkalpinang. selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulat (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa PPJ berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta dengan objek penelitian yang dilakukan pada Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Pajak Parkir diduga memberikan pengaruh yang positif terhadap PAD. Peningkatan Pajak Parkir karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Dan jumlah pengguna kendaraan bermotor, hal ini tentu saja akan menimbulkan lahan parkir baru juga semakin meningkat. Dengan meningkatnya atau bertambahnya jumlah tempat parkir baik di luar badan jalan atau tempat lain yang berkaitan dengan pokok usaha dan penitipan kendaraan bermotor. Oleh karena itu jika dilihat dari alasan tersebut penerimaan Pajak Parkir akan meningkat sekaligus meningkatkan PAD Kota Pangkalpinang. hal ini selaras dengan penelitian Riskhi (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pajak Parkir berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di Kabupaten di Jawa Tengah dengan objek penelitian yang dilakukan di Dinas Pelayanan Pajak Kabupaten di Jawa Tengah.

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Sumber : diolah oleh penulis

.. Hipotesis

Hipotesis merupakan instrumen kerja berupa pertanyaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini. Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat disusun beberapa jawaban sementara dari permasalahan penelitian. Dan masih dibutuhkan secara empiris yaitu sebagai berikut :

1. Hipotesis Pertama
 H_{a1} = Diduga terdapat pengaruh Pajak Reklame, PPJ dan Pajak Parkir secara simultan terhadap PAD Kota Pangkalpinang.
2. Hipotesis Kedua
 H_{a2} = Diduga terdapat pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD Kota Pangkalpinang.
3. Hipotesis Ketiga
 H_{a3} = Diduga terdapat pengaruh PPJ terhadap PAD Kota Pangkalpinang.
4. Hipotesis Keempat
 H_{a4} = Diduga terdapat pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD Kota Pangkalpinang.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis mengambil objek penelitian berupa pajak daerah khususnya Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Parkir di Kota Pangkalpinang. Penulis mengambil objek tersebut dengan pertimbangan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang guna mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata. Data penelitian diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkalpinang tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.

Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis analisis, yaitu:

a. Analisis Location Quotient (LQ) Pajak Daerah Kota Pangkalpinang.

Variabel-variabel yang digunakan adalah:

- Pajak daerah pada tahun-tahun yang dibandingkan
- Jumlah pajak daerah pada tahun-tahun yang dibandingkan

b. Analisis Regresi Berganda

Variabel-variabel yang digunakan adalah:

- Variabel bebas (*independent variable*)
Variabel bebas atau *independent variable* merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Biasanya dinotasikan dengan simbol X. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Pajak Reklame (X_1), Pajak Penerangan Jalan (X_2), dan Pajak Parkir (X_3).
- Variabel terikat (*dependent variable*)
Variabel terikat atau *dependent variable* merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang (Y).

Teknik Pengumpulan Data

Pengertian data adalah suatu yang diketahui atau dianggap dapat memberikan gambaran tentang keadaan atau persoalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah, berupa publikasi data yang telah dikumpulkan oleh pihak atau instansi lainnya dengan cara mempelajari beberapa sumber buku atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Data sekunder yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis mengolah data menggunakan bantuan Ms. Excel dan Software Program NCSS, yang terdiri atas:

- Analisis kualitatif, yaitu mengolah data secara kualitatif, menggolongkan data, menguraikan data, menguraikan secara deskriptif hasil penelitian yang dilakukan serta mengambil kesimpulan secara kualitatif.
- Analisis kuantitatif, yaitu mengolah data dengan sebagian data yang tersedia (berbentuk angka) sebagai suatu pedoman dalam menarik suatu kesimpulan.

Location Quotient (LQ)

Teori *Location Quotient* digunakan untuk menganalisis dan menentukan keragaman basis ekonomi

(potensi pajak daerah Kota Pangkalpinang). Dari analisis tersebut dapat diidentifikasi yang mana antara Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir yang dapat dikembangkan untuk dioptimalisasi. Sehingga yang dikatakan potensial dapat dijadikan prioritas utama dalam perencanaan pembangunan perekonomian. Formula yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Dimana:

LQ_{ij} : Indeks *quotient* lokasi Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

X_{ij} : Nilai tiap tahun tiap Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

X_i : Nilai seluruh tahun tiap Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

X_j : Nilai tiap tahun seluruh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

$X_{..}$: Nilai total Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

Koefisien LQ berkisar dari 0 sampai positif tak terhingga. Nilai yang ditunjukkan LQ ini memiliki arti sebagai berikut:

- Jika nilai $LQ > 1$, maka pajak daerah yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif lebih tinggi dari rata-rata. Dengan kata lain bahwa pajak-pajak tersebut lebih terspesialisasi dibandingkan dengan pajak daerah yang lain.
- Jika nilai $LQ = 1$, maka pajak daerah yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif sama dengan rata-rata semua pajak daerah.
- Jika nilai $LQ < 1$, maka pajak daerah yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan yang komparatif. Dengan kata lain bahwa pajak-pajak tersebut kurang terspesialisasi dibandingkan pajak daerah yang lain.

Analisis Regresi Berganda

Digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan formula sebagai berikut:

1. Analisis Determinasi (R^2)

Menyatakan proporsi keragaman pada variabel bergantung yang mampu dijelaskan oleh variabel penduganya. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menunjukkan pengaruh variabel penduga terhadap variabel bergantung yang semakin kuat. Sebaliknya,

IV. PEMBAHASAN

Hasil Analisis LQ Pajak Daerah Kota Pangkalpinang

Hasil analisis keunggulan komparatif pajak daerah di atas menunjukkan nilai LQ yang bervariasi, dimana terdapat pajak daerah yang memiliki nilai $LQ < 1$ dan pajak daerah yang memiliki nilai $LQ > 1$. Begitu juga dengan besaran nilai LQ yang diperoleh, ada pajak daerah yang memiliki nilai LQ yang cenderung meningkat, ada yang

berfluktuasi dan bahkan ada yang cenderung menurun. Pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif adalah pajak daerah yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan memiliki besaran nilai LQ yang cenderung meningkat.

Pajak Hotel memiliki tren nilai LQ fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, terjadi dua kali penurunan selama rentang waktu penelitian namun apabila di rata-rata, nilai LQ Pajak Hotel > 1 . Pajak restoran memiliki tren nilai LQ sama fluktuatifnya dengan Pajak Hotel namun dengan kecenderungan menurun, apabila di rata-rata nilai LQ Pajak Restoran > 1 . Nilai LQ Pajak Restoran naik di tahun 2012, kemudian merosot lagi perlahan-lahan sampai tahun 2017. Pajak Hiburan memiliki tren nilai LQ fluktuatif dengan nilai rata-rata $LQ > 1$.

Pajak Reklame memiliki tren nilai LQ fluktuatif, menurun sampai tahun 2013 kemudian naik perlahan sampai tahun 2016 dan turun lagi di 2017. Rata-rata LQ Pajak Reklame < 1 . PPJ menurun di rentang waktu 2011 sampai tahun 2014, kemudian baru mulai naik terus sampai tahun 2017. Rata-rata LQ PPJ = 1. Tren nilai LQ Pajak Minerba menurun, nilai LQ Pajak Minerba terus merosot dari tahun 2012 sampai dengan 2017. Rataan LQ Pajak Minerba > 1 . Pajak Parkir memiliki tren nilai LQ fluktuatif dengan rata-rata nilai $LQ < 1$.

Pajak Air Tanah baru mulai dipungut di tahun 2011. Dari mulai dipungut, nilai LQ -nya fluktuatif namun apabila dilihat selama empat tahun terakhir, penerimaannya terus menurun. Rataan LQ Pajak Air Tanah < 1 . Pajak Walet memiliki tren nilai LQ fluktuatif cenderung menurun. Penurunan terjadi dari 2010 sampai dengan 2012, naik di 2013 kemudian turun lagi di 2014. Naik kembali di 2015, kemudian terus turun sampai 2017. Rataan LQ Pajak Walet > 1 . BPHTB tren-nya terus menurun dari mulai pemungutannya tahun 2011 sampai dengan 2016. Naik di tahun 2017 kemudian turun lagi di 2018. Rataan nilai LQ BPHTB < 1 . PBB-P2 mulai dipungut tahun 2013, mengalami naik turun dari 2013 sampai dengan 2015, kemudian terus menurun sampai 2017. Rataan LQ PBB-P2 < 1 .

Potensi Pajak Daerah yang memiliki nilai $LQ > 1$ pada $\geq$ empat tahun analisis dan memiliki besaran nilai LQ yang cenderung bagus sekaligus berpeluang dalam banyak faktor adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Minerba, dan Pajak Air Tanah. Pajak Hotel memiliki nilai $LQ > 1$ pada tahun 2011 sampai dengan tahun

2012, tahun 2015, dan tahun 2018. Pajak Restoran memiliki nilai $LQ > 1$ pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan tahun 2015. Pajak Hiburan memiliki nilai $LQ > 1$ pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pajak Reklame memiliki nilai $LQ > 1$ pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. PPJ memiliki nilai $LQ < 1$ pada tahun 2010, 2016, dan 2017. Pajak Minerba memiliki nilai $LQ < 1$ pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pajak Parkir memiliki nilai $LQ > 1$ pada tiga tahun analisis yaitu tahun 2012, 2013, dan 2015.

Pajak Air Tanah memiliki nilai $LQ < 1$ pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016. Pajak Air Tanah memiliki nilai $LQ < 1$ pada empat tahun analisis. Pajak Sarang Burung Walet memiliki nilai $LQ > 1$ pada tiga tahun analisis yaitu tahun 2010, 2011 dan 2013.

BPHTB memiliki nilai $LQ > 1$ pada lima tahun analisis tetapi pemungutannya tidak rutin, objek pajaknya selalu tidak sama setiap tahunnya. PBB-P2 memiliki nilai $LQ > 1$ pada empat tahun analisis tetapi pemungutannya baru dimulai tahun 2013 sehingga tidak bisa dijadikan variabel.

Analisis Kelayakan Model Penelitian

Untuk melihat pengaruh secara statistik Pajak Reklame, PPJ dan Pajak Parkir terhadap PAD maka dilakukan perhitungan menggunakan program NCSS agar diperoleh nilai persamaan regresi linear berganda. Berikut nilai koefisien masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Hasil Analisis Pengaruh Pajak Reklame, PPJ dan Pajak Parkir Secara Simultan terhadap PAD

Dependent Variable : PAD			
Independent Variable	Regression Coefficient	Prob. Level	Decision (5%)
Intercept	1.72062	0.414314	Accept H_0
Pajak Reklame	2.652748	0.866202	Accept H_0
PPJ	3.898917	0.152564	Accept H_0
Pajak Parkir	150.7482	0.176863	Accept H_0
R-Squared	0.961933		
	F-Ratio	Prob-Level	
	25.2698	0.012464	
Multicollinearity is NOT a problem.			

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel hasil olahan di atas, maka dapat dibuat suatu model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$PAD = 1.72062 + 2.652748 \text{ Pajak Reklame} + 3.898917 \text{ PPJ} + 150.7482 \text{ Pajak Reklame}$$

Tabel V.10. menampilkan uji kelayakan secara statistik dimana R^2 sebesar 0.961933 yang berarti bahwa 96,1933% PAD dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Reklame, PPJ dan Pajak Parkir. Sedangkan sisanya 3.8067% (100% - 96.1933%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk uji multikolinearitas dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas dengan pernyataan *Multicollinearity is not a problem*, yang berarti tidak ada hubungan antar variabel-variabel bebas dalam penelitian ini. Penelitian yang baik adalah yang variabel bebasnya tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Untuk Uji F hasilnya signifikan, dilihat dari nilai *F-ratio* sebesar 25.2698 dengan *prob Level* 0.012 $<$ 0.05. Karena hasilnya signifikan, maka Pajak Reklame, PPJ dan Pajak Parkir mampu mempengaruhi PAD. Ketiga indikator inilah yang menunjukkan bahwa model statistik yang digunakan telah memenuhi standar statistik yang benar

sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang diakui dalam statistik.

Pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD

Untuk melihat hasil pengaruh statistik Pajak Reklame terhadap PAD maka peneliti telah melakukan perhitungan dengan menggunakan program NCSS. Nilai-nilai dari koefisien variabel Pajak Hotel disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2

Hasil Analisis Pengaruh Pajak Reklame Terhadap PAD

Dependent Variable : PAD			
Independet Variable	Regression Coefficient	Prob. Level	Decision (5%)
Intercept	1.72062	0.414314	Accept H ₀
Pajak Reklame	2.652748	0.866202	Accept H ₀

Sumber : Data olahan

Tabel 2. menunjukkan bahwa nilai *prob. Level* Pajak Reklame 0.866202 maka nilai signifikansi $0.86 < 0,05$ sehingga H₀ diterima dan H₁ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel Pajak Reklame terhadap PAD.

Pengaruh Pajak PPJ terhadap PAD

Untuk melihat hasil pengaruh statistik Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan program NCSS. Nilai-nilai dari koefisien variabel Pajak Penerangan Jalan penulis sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3

Hasil Analisis Pengaruh Pajak PPJ terhadap PAD

Dependent Variable : PAD			
Independet Variable	Regression Coefficient	Prob. Level	Decision (5%)
Intercept	1.72062	0.141314	Accept H ₀
PPJ	3.898917	0.152564	Accept H ₀

Sumber : Data olahan

Tabel V.3 . menunjukkan bahwa nilai *prob. Level* PPJ 0.152564 maka nilai signifikansi $0.15 < 0,05$ sehingga H₀ diterima dan H₁ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel PPJ terhadap PAD.

Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD

Untuk melihat hasil pengaruh statistik Pajak Parkir terhadap PAD maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan program NCSS. Nilai-nilai dari koefisien variabel Pajak Penerangan Jalan penulis sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4

Hasil Analisis Pengaruh Pajak Parkir terhadap PAD

Dependent Variable : PAD			
Independet Variable	Regression Coefficient	Prob. Level	Decision (5%)
Intercept	1.72062	0.414314	Accept H ₀
Pajak Parkir	150.7482	0.176863	Accept H ₀

Sumber : Data olahan

Tabel V 4 menunjukkan bahwa nilai *prob. Level* Pajak Parkir 0.176863 maka nilai signifikansi $0.17 < 0,05$ sehingga H₀ diterima dan H₁ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel Pajak Parkir terhadap PAD.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Potensi pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif dari hasil analisis tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 adalah Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.
2. Pajak Reklame tidak berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang
3. Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Pajak Parkir tidak berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.
2. Menjadikan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir sebagai prioritas utama untuk dikembangkan potensinya.
3. Melakukan ekstensifikasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir. Potensi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir yang belum dipungut harus dimaksimalkan, agar potensi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir yang ada dapat semuanya dipungut oleh pemerintah daerah Kota Pangkalpinang.
4. Melakukan intensifikasi Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir. Potensi Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir yang sudah dipungut harus diintensifkan pemungutannya oleh pemerintah Kota Pangkalpinang, agar potensi penerimaan yang sudah dipungut tersebut dapat ditungkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adriani . 2014.*Teori Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
2. Ali, E.M. *Gerbang Merah Permata*, Emas Bangka Production. 2003
3. Bahari, H. *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
4. BPS dan BAPEDA Kab.Bangka.*Bangka Dalam Angka 2004*, BPS Kab.Bangka.2005
5. DISPENDA dan Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. *Laporan Akhir Pengkajian Peningkatan PAD*, Jakarta. 2003
6. Dr.Soeparman Soemahamidjaja. universitas Padjajaran, Bandung. 1964
7. Halim, A dan N, Sutjipto. *Kompak*, Yayasan Dharma Bakti "IPTEK" STIE YO. Yogyakarta. 2001
8. Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI. Yogyakarta. 2002 *Perpajakan*, ANDI. Yogyakarta. 2002
9. Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Press, Yogyakarta, 2003. _____, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Press, Yogyakarta, 2011
10. Mr. Dr. N.J Fiedmann. *De Overheidsmiddelen Van Indonesia*, Leiden. 1949
11. Nazir, M. *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1999
12. Pusat Info Data Indonesia (PIDI). *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta. 2004
13. Rochman Soemitro. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Halim. 2001
14. Siahaan, P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali. Jakarta. 2005
15. Suandy, E. *Hukum Pajak*, Edisi I. Salemba Empat. Jakarta. 2000
16. Todaro, M dan S, Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga. Jakarta. 2003
17. Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, Edisi V. salemba Empat. Jakarta. 2005
18. Zabini, A.I. *Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Sebuah Tinjauan*, DISPENDA. Kab. Bangka. 2006
19. Pemda Kota Pangkalpinang. *Keuangan Daerah*, [http: www.bangka.go.id](http://www.bangka.go.id). (07 Mei 2019)
20. Pemda Kota Pangkalpinang. *Analisis Potensi Pembangunan Ekonomi*, [http: bapeda.bangka.go.id](http://bapeda.bangka.go.id). (15 Juni 2019)